

2520-Article Text-9319-1-15- 20220819.docx

by

Submission date: 21-Aug-2022 05:58AM (UTC-0400)

Submission ID: 1884918223

File name: 2520-Article Text-9319-1-15-20220819.docx (223.65K)

Word count: 2405

Character count: 15371

PENGARUH KONEKSI POLITIK, KOMISARIS OTONOM, KOMITE AUDIT DAN UKURAN PERSEROAN PADA AUDIT FEE

Andik Purnomo Adji¹, Hestin Sri Widiawati², Andy Kurniawan³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNP Kediri

andikadji8209@gmail.com

ABSTRACT

The determination of the auditor's remuneration is not regulated by a clear law and still refers to the agreement between the auditor and the client. The purpose of this study is to partially and simultaneously examine the impact of political connections, Otonom commissioners, audit committees and company size on audit fees. The study was conducted using a quantitative approach. The study population was drawn from companies included in the Jakarta Islamic Index in 2018-2021 and a sample of 20 companies was obtained using the targeted sampling method. The analysis method used is a multiple linear regression analysis using SPSS v23 software. Findings of this study: (1) Partially political connections, Otonom commissioners, audit committees do not have a significant impact on audit fees. Meanwhile, the size of the company partially has a significant impact on the cost of the audit. (2) Political connections, Otonom commissioners, audit committees, and company size simultaneously have a significant impact on audit fees.

Keywords : Political Connections, Otonom Commissioner, Audit Committee, Company Size, Audit fee

ABSTRAK

Penetapan remunerasi auditor tidak diatur dalam undang-undang yang jelas dan tetap mengacu pada kesepakatan antara auditor dengan klien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara parsial dan simultan dampak koneksi politik, komisaris Otonom, komite audit dan ukuran Perseroan pada *audit fee*. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian diambil dari Perseroan yang masuk dalam *Jakarta Islamic Index* tahun 2018-2021 dan sampel diperoleh sebanyak 20 Perseroan dengan menggunakan metode *sampling bertarget*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *software SPSS v23*. Temuan penelitian ini: (1) Koneksi politik, komisaris Otonom, komite audit masing-masing tidak berdampak secara relevan pada *audit fee*. Sedangkan ukuran Perseroan secara parsial berdampak secara relevan pada biaya audit. (2) Koneksi politik, komisaris Otonom, komite audit, dan ukuran Perseroan secara simultan berdampak secara relevan pada *audit fee*.

Kata kunci : Koneksi Politik, Komisaris Otonom, Komite Audit, Ukuran Perseroan, *Audit fee*

PENDAHULUAN

Laporan tahunan memuat informasi tentang seluruh kegiatan Perseroan, yang mencerminkan kondisi keuangan perseroan. Keterangan yang tercantum pada *financial statements* urgensi sekali bagi para investor, pemerintah, warga negara dan kreditor sebagai pengguna laporan. Hal ini dikarenakan *financial statements* sangat berguna bagi pemakai *financial statements* untuk menarik kesimpulan, penyajian *financial statements* harus netral, andal dan *up to date*. Untuk menjaga netralitas *financial statements*, perlu dilakukan kajian pada laporan auditor Otonom. Auditor Otonom sebagai auditor yang tidak berpihak dan bebas dari campur tangan pengguna *financial statements*, baik manajemen maupun pihak yang berkepentingan. Auditor otonom mengkaji *financial statements* perseroan dalam rangka meningkatkan kualitas *financial statements* yang diberikan oleh manajemen kepada pemangku kepentingan atau pengguna *financial statements* saat mengambil keputusan. Salah satu hal yang tercermin dalam *financial statements* adalah tingginya biaya audit yang diterima auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Tinggian remunerasi yang diperoleh auditor atas tugas audit yang diamanatkan kepada klien belum ditentukan, tinggian nominalnya ditetapkan juga cenderung berubah-ubah. Di Indonesia, belum ada aturan yang mengatur tinggian remunerasi yang diterima auditor atas pemberian jasa audit, hanya aturan yang diputuskan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tahun 2008 tentang pedoman penetapan biaya audit. Terakhir, IAPI mengeluarkan Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/II/2008 tanggal 2 Juli 2008 tentang aturan dan khitah penetapan biaya kerja auditor. Pada lampiran 1

menjelaskan pedoman ini diterbitkan untuk digunakan menjadi pedoman bagi semua elemen Ikatan Akuntan Indonesia, yang juga menjelaskan bahwa dalam menentukan biaya pekerjaan yang lazim dan pantas dengan etika pekerjaan seorang akuntan dan secara nominal sesuai dengan jasa yang diberikan pada dasar standar profesional akuntan yang berlaku. Kondisi ini menyatakan bahwa *audit fee* ditetapkan secara subjektif, artinya *fee audit* yang diterima auditor ditentukan atas dasar negosiasi antara auditor dengan klien dalam situasi persaingan antar auditor. Dalam situasi seperti itu, diperlukan pengetahuan manajemen untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingginya remunerasi auditor eksternal.

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti *The Impact of Political Connections, Good Corporate Governance dan Financial Performance on Tax Evasion* (2020) karya Maidina dan Wati, menyatakan bahwa gambaran dunia bisnis sangat terkait dengan politik karena kesuksesan bisnis tidak lepas dari pengaruh politik[1] Perseroan dengan koneksi politik akan menggunakan metode tertentu untuk membangun koneksi politik atau mencari pemulihan hubungan dengan politisi atau pemerintah. Manfaat yang diterima oleh Perseroan dengan koneksi politik adalah akses ke pembiayaan utang, pajak yang lebih rendah, peningkatan kekuatan pasar[2]. Namun, penelitian lain menyatakan bahwa Perseroan dengan koneksi politik memiliki tingkat transparansi *pefinancial statements* yang rendah, yang mengarah pada kualitas *pefinancial statements* yang buruk dan risiko distorsi *pefinancial statements* [3]. Semakin tinggi risikonya, semakin banyak upaya yang dilakukan auditor untuk memeriksa Perseroan yang terhubung secara politik, sehingga biaya audit juga meningkat. Diasumsikan bahwa semakin tinggi risiko yang diambil oleh auditor, semakin tinggi biaya yang harus ditanggung oleh auditor.

Penelitian P. A. Alves, I. G. N. Sanjaya dan I. P. B. Anggrirawan (2021) menyatakan bahwa dengan GCG yang baik, Perseroan dapat menerapkan tata kelola yang baik, memitigasi risiko, menjaga standar kualitas produk, meningkatkan akses permodalan, dan meningkatkan efisiensi Perseroan [4]. Untuk menjaga stabilitas keuangan dalam suatu Perseroan, pengenalan tata kelola Perseroan sangat penting untuk menjalankan bisnis modern. Memiliki tata kelola Perseroan yang baik akan memungkinkan Perseroan untuk diatur dan dikendalikan agar dapat menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini berbeda dengan Perseroan yang berada di Indonesia yang umumnya belum menerapkan prinsip tata kelola Perseroan secara berkelanjutan, sehingga dapat menyebabkan krisis keuangan. Selain itu, tingginya manajemen suatu Perseroan juga mempengaruhi bagaimana kemampuan suatu Perseroan dalam mengendalikan dan mengatur pergerakan Perseroannya tercermin dalam penyajian *financial statements* nya. Hal ini dikarenakan kemungkinan terjadinya misrepresentasi akibat kelalaian manajemen dalam melakukan verifikasi dan pengawasan pada peredaran harta kekayaan yang menimbulkan risiko. Kehadiran auditor internal dan komite audit Perseroan memegang peranan penting dalam penyusunan *financial statements* . Pihak-pihak tersebut harus memiliki pemahaman yang sama mengenai peran masing-masing unit yang dilakukan agar penerapan tata kelola Perseroan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, mereka akan mencari bantuan tambahan dari auditor yang memenuhi syarat, yang akan menyebabkan peningkatan biaya audit.

Dari hasil penjabaran diatas, penelitian ditujukan untuk mengetes apakah variabel koneksi politik, komisaris otonom, komite audit dan ukuran perseroan berdampak pada *audit fee*. Peneliti meyakini bahwa variabel koneksi politik dan berbeda lokasi penelitian yang dilakukan menunjukkan kebaruan. Peneliti juga bahwa dengan penelitian ini perlu dilakukan karena untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit fee* dan apabila memunculkan kelemahan pada penelitian ini dapat memberikan saran dan rekomendasi untuk kesempurnaan penelitian kedepannya.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang dipergunakan sebelum pengujian berupa data sekunder yang diambil dari laporan akhir tahunan perseroan yang dipublikasikan di website Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi pada pengujian ini adalah 30 perseroan yang teregistrasi di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2018-2021. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *purposive sampling*, karena tidak semua anggota populasi dijadikan sampel untuk penelitian. Berdasarkan kriteria

yang digunakan, jumlah sampel yang sesuai syarat kriteria ditentukan adalah 20 Perseroan. Pengetesan dilakukan dengan serangkaian pengetesan mulai dari uji hipotesis klasik sebagai prasyarat kualitas data hingga pengetesan uji regresi linier berganda mulai dari pengetesan normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Kemudian memeriksa koefisien determinasi dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Asumsi Klasik

Pada tahap pengetesan asumsi klasik, pengetesan ini dilakukan untuk membaca apakah data yang dipergunakan dalam suatu penelitian telah teruji kualitasnya untuk diteliti. Uji yang dilakukan pada asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.

Hasil normalitas dilakukan "untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal"[5]. Uji kenormalan didapat dengan menengok gambar histogram dan grafik *Normal Probability Plot* dan didapatkan telah memenuhi uji normalitas serta nilai Uji Kolmogorov Smirnov memiliki taraf signifikan $0,200 > 0,05$. Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menyatakan yang dapat disimpulkan bahwa data yang telah diolah diatas telah teralokasi normal atau yang bermakna H_0 diterima dan H_a ditolak.

Saat menguji multikolinearitas pada semua variabel Otonom yaitu koneksi politik, komisaris otonom, komite audit dan ukuran perseroan, nilai toleransinya lebih tinggi dari 0,10, yaitu 0,903, 0,807, 0,938, 0,788, dan VIF kurang dari 10, yaitu 1,107, 1,239, 1,066, dan 1269. Dengan demikian, dapat disimpulkan pengetesan ini memakai seluruh variabelnya untuk memprediksi *audit fee* karena hasil tidak menyebabkan multikolinearitas.

Pada uji heteroskedastisitas, dengan melihat *scatterplot* yang menyatakan bahwa titik-titik terdistribusi secara random di atas dan di bawah angka 0 di sumbu y dan tak membuat model tertentu, maka dapat disimpulkan tak menyebabkan heteroskedastisitas pada pengetesan ini. .

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, nilai *Durbin-Watson* (DW) yang dihasilkan adalah 2,131, sedangkan grafik uji DW ($k=5, n=75$) untuk nilai batas bawah (dL) = 1,86 dan batas atas (dU) = 1,7698. Jika dibandingkan dengan kedua nilai diatas maka nilai *Durbin-Watson* berada diantara batas bawah (dL) = 1,86 dan (-du) = -1,7698 = 2,2302. Dapat disimpulkan hipotesis nol (H_0) diterima yang bermakna tidak terdapat tanda-tanda positif atau negatif dari autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menganalisis hasil uji memakai analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menggambarkan pengaruh koneksi politik, komisaris Otonom, komite audit, dan ukuran Perseroan pada *audit fee* melalui perangkat lunak pemrograman *Solution.Statistical Products and Services (SPSS) for Windows versi 23*. uji regresi dapat disajikan pada hasil berikut.

Tabel 1
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	-1.446	.205
Koneksi Politik	-.003	.021
Komisaris Independen	-.006	.019
Komite Audit	-.005	.015
Ukuran Perusahaan	1.173	.025

Dari hasil regresi linier berganda melalui *software* SPSS Versi 23, hasil persamaan regresi linier adalah sebagai berikut :

$$Y = -1,446 - 0,003X_1 - 0,006X_2 - 0,005X_3 + 1,173X_4 + \epsilon$$

Dari hasil di atas dapat diasumsi sebagai berikut: (1) Konstanta -1.466 menyatakan bahwa jika semua variabel tetap konstan, biaya audit berubah senilai -1.466 (2) Variabel koneksi politik (X1) bernilai negatif artinya setiap terjadi peningkatan ikatan politik oleh suatu entitas maka akan mengurangi *audit fee* senilai 0,003 (3) Variabel komisaris Otonom (X2) bernilai negatif artinya setiap kali komisaris bertambah satu satuan maka *audit fee* akan turun 0,006 (4) Variabel komite audit (X3) negatif artinya setiap kali komite audit bertambah satu unit maka *audit fee* akan berkurang, audit akan turun 0,005. (5) Variabel Perseroan (X4) bernilai positif, artinya setiap kali ukuran Perseroan bertambah satu unit maka *audit fee* akan meningkat senilai 1.173.

Hasil Uji R² (Koefisien Determinasi)

Tabel 2
Hasil Uji R²
Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.988 ^a	.976	.975	.07952

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Koneksi Politik, Komisaris Independen
b. Dependent Variable: *Audit fee*

Nilai R² yang didapatkan adalah 0,975 atau 97,5%. Hasil ini bermakna variasi dari *audit fee* dapat dijelaskan oleh perbedaan koneksi politik, komisaris Otonom, komite audit dan ukuran Perseroan senilai 97,5%, sedangkan perubahan 2,5% dijelaskan faktor lain yang tak teruji dalam penelitian ini.

Hasil Uji T (Parsial)

Tabel 3
Hasil Uji T
Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-7.054	.000
	Koneksi Politik	-.162	.872
	Komisaris Independen	-.329	.744
	Komite Audit	-.332	.741
	Ukuran Perusahaan	47.779	.000

a. Dependent Variable: *Audit fee*

(1) Hubungan politik (X1) memiliki nilai *t-score* senilai 0,162 dan hasil penerimaan senilai 0,872 yang lebih tinggi dari 0,05, sehingga H₀ diterima dan H_a adalah ditolak yang bermakna bahwa koneksi politik tidak berdampak secara relevan pada *audit fee*. (2) Komisaris otonom (X2) memiliki nilai *t-score* senilai 0,329 dan hasil penerimaan 0,744 yang lebih tinggi dari 0,05, sehingga H₀ diterima dan H_a ditolak yang bermakna komisaris otonom secara parsial tidak signifikan mempengaruhi *audit fee* (3) Komite audit (X3) memiliki *t-score* senilai -0,332 dan hasil penerimaan 0,741 yang lebih tinggi dari 0,05, sehingga H₀ diterima dan H_a ditolak yang bermakna komite audit secara parsial tidak memiliki dampak secara relevan pada *audit fee*. (4) Ukuran Perseroan (X4) memiliki nilai *t-score* senilai 47,779 dan hasil penerimaan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H₀ ditolak dan H_a diterima yang artinya ukuran Perseroan secara parsial berdampak secara relevan pada *audit fee*.

Hasil Uji Simultan (F)

Tabel 4
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	18.377	4	4.594	726.468	.000 ^b
Residual	.443	70	.006		
Total	18.820	74			

a. Dependent Variable: *Audit fee*
b. Predictors: (Constant), Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Koneksi Politik, Komisaris Independen

Dari tabel 7, menyatakan nilai penerimaan 0,000 terletak dibawah dari 0,05 alhasil dapat ditarik hipotesis bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang bermakna variabel koneksi politik, komisaris otonom, komite audit, ukuran perseroan secara kolektif dapat diterima mempengaruhi *audit fee* (Y).

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, variabel koneksi politik (X1) memiliki *t-score* senilai -0,162 dan nilai penerimaan 0,872 yang lebih tinggi dari 0,05, sehingga variabel koneksi politik secara parsial tergolong tidak berdampak secara relevan pada tinggian *audit fee*. Dengan demikian, hipotesis yang dihasilkan adalah H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya ikatan politik tidak berdampak secara relevan pada tinggian biaya audit.

Dari hasil pengujian di atas, disimpulkan bahwa variabel Otonom agen (X2) memiliki *t-score* senilai -0,329 dan nilai penerimaan 0,744 yang lebih tinggi dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang bermakna komisaris Otonom secara parsial tidak berdampak secara relevan pada tinggian *audit fee*.

Dari hasil pengujian di atas, disimpulkan bahwa variabel komite audit (X3) memiliki nilai *t-score* senilai -0,332 dan nilai penerimaan senilai 0,741 yang lebih tinggi dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang bermakna Komite Audit secara parsial tidak berdampak relevan pada *audit fee*.

Dari hasil pengujian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel "Ukuran Perseroan" (X4) memiliki *t-score* 47,779 dan nilai penerimaan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang bermakna perseroan memiliki dampak biaya yang signifikan secara parsial pada *audit fee*.

Terakhir, secara simultan menyatakan bahwa variabel koneksi politik, komisaris otonom, komite audit dan ukuran oerseroan mempengaruhi *audit fee*. Artinya semua faktor yang menjadi variabel secara kolektif berdampak pada variabel yang ditulis.

SIMPULAN

Bersumber pada output dan pembahsan data yang diutarakan, variabel koneksi politik, komisaris otonom, dan komite audit masing-masing tidak berdampak secara relevan pada *audit fee*, sedangkan variabel ukuran perseroan berdampak secara relevan pada variabel *audit fee* pada kasus perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) 2018-2021. Pada pengujian secara simultan, semua variabel memiliki dampak secara relevan pada *audit fee* untuk perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) 2018-2021.

Selain menyatakan hasil temuan yang telah diuji, penelitian ini dilakukan sebagai sumbangsih peneliti pada kinerja auditor dalam melaksanakan tugas audit sehingga diharapkan kedepannya keberadaan auditor mendapatkan hak yang wajar sehingga kinerja auditor untuk memberikan opini juga mendukung perkembangan Perseroan khususnya di Indonesia.

Peneliti meyakini bahwa hasil temuan yang didapatkan ini masih banyak kekurangan, sehingga kedepannya penambahan obyek dan lokasi penelitian yang berbeda memberikan hasil yang lebih baik.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] L. P. Maidina and L. N. Wati, "Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Pada Tax Avoidance," *J. Akunt.*, vol. 9, no. 2, pp. 118–131, 2020, doi: 10.37932/ja.v9i2.95.
- [2] A. N. S. Wea, "Political connection, CEO gender, internal audit, corporate complexity and *audit fee* in go public companies in Indonesia," *Res. J. Financ. Account.*, vol. 8, no. December, pp. 10–18, 2019, doi: <https://doi.org/10.7176/RJFA/10-12-02>.
- [3] F. Nurjanah and E. Sudaryati, "The effect of political connection and effectiveness of audit committee on *audit fee*," *Indones. Account. Rev.*, vol. 9, no. 2, p. 227, 2019, doi: 10.14414/tiar.v9i2.1848.
- [4] P. A. Alves, I. G. N. Sanjaya, and I. P. B. Anggririawan, "Pengaruh Kompetensi Audit Internal Dan Kualitas Jasa Audit Pada Good Corporate Governance (GCG)," *J. Ris. Akunt. Warmadewa*, vol. 2, no. 1, pp. 17–21, 2021, doi: 10.22225/jraw.2.1.2930.17-21.
- [5] Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, vol. 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.stkipppgritulungagung.ac.id Internet Source	3%
2	eprints.umg.ac.id Internet Source	1%
3	123dok.com Internet Source	1%
4	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	1%
5	media.neliti.com Internet Source	1%
6	docplayer.info Internet Source	1%
7	id.scribd.com Internet Source	1%
8	core.ac.uk Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 15 words